

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Alam, Wawan Tunggul., Memahami Profesi Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal), Jakarta, Milenia Populer, 2004.

Anshori, Abdul Ghofur., Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif hukum dan etika, Yogyakarta, UII Press, 2009.

Budiono, Herlien. Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Fajar. Mukti., dan Achmad, Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

H.S, Salim., Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015.

Harahap, Nuzuarlita Permata Sari., Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2011.

Mertokusumo, Sudikno., Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty, 1999.

Nico., Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Yogyakarta, Center of Dokumentation and Studies of Business Law, 2003.

Notodisoerjo, R. Soegondo., Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan, Jakarta, Rajawali, 1982.

Simbolon, Maringan Masry., Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004.

Sirajunn., Sukriono, Didik., Winardi., Hukum Pelayanan Publik, Malang, Setara Press, 2012.

Situmorang, Victor., dan Jubir, Jusif., Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Yogyakarta, Rineka Cipta, 2001.

Soekanto, Soerjono., Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI press, 1986.

Sungguno, Bambang., Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Sungguno, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Tan, Kie, Thong. Beberapa Mata Pelajaran: Dan, Serba-Serbi Praktek Notaris, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011.

Tedjosaputro, Liliana. Etika Profesi Notaris: dalam Penegakkan Hukum Pidana, Yogyakarta, Bigraf Publidhing, 1995.

Tjandra, Riawan. Hukum Keuangan Negara, Grasindo, Jakarta, 2009.

Tobing, G.H.S. Lumban., Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, 1999.

Umar, Husein., Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis, Jakarta, Rajawali, 2013.

### **Jurnal**

Abdullah, Nawaaf., dan Munsyarif Abdul Chalim, “Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Autentik”, Jurnal Akta, Vol. 4, No. 4 ( Januari 2017): 661-662.

Asufie, Khairunnisa Noor., Nur Aripkah, dan Ali Impron, “Urgensi Standarisasi Kualifikasi Karyawan Notaris di Indonesia”, Notary Law Journal, Vol. 2, No. 3 (Juli 2023): 221.

Ayu, Giovanni Karilla, “Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Akta Notaris atas Pencabutan Sertifikat Hak Milik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100k/TUN/2018)”. Indonesian Notary, Vol. 2, Artikel 12 (September 2020): 269.

Dewi, Maya Puspita, “Prinsip Pembacaan Akta oleh Notaris Di hadapan Penghadap dan Saksi” Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 2, No.1, (Mei 2021): 92-114.

Saputra, Denny dan Sri Endah Wahyu Ningsih, “Prinsip Kehati-hatian Bagi Notaris/PPAT dalam Menjalankan Tupoksinya dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik”, Jurnal Akta, Vol. 4, No. 3 (September 2017): 351.

Saputra, Riyan, dan Gunawan Djajaputra., “Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri melalui Media Sosial”, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1 No.1 (Juli 2018): 3-4.

Maharani, Adella Tiara, “Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Terkait Ketidackapakan Penghadap Setelah Penandatanganan Akta”, Officium Notarium, Vol. 1, Article.1 (September 2021): 4.

Merlyani, Dwi, “Kewajiban Pembacaan Akta autentik oleh Notaris di Hadapan Penghadap: Terkait dengan Konsep Cyber Notary”, *Repertorium*, Vol.9, No.1, (Mei 2020): 36-47.

Mitchell, D. E., dan R. K. Ream, “Professional Responsibility: The Fundamental Issue in Education and Health Care Reform”, *Springer*, Vol. 4 (2015): 5.

Nugraha, Putu Putri., dan I Nyoman Bagiastra, “Perlindungan Hukum Pegawai Notaris sebagai Saksi Akta Autentik dalam Proses Peradilan Terkait Akta Otentik”, *Jurnal Kertha Samaya*, Vol. 10, No. 7 (Juni 2022): 1541.

Putri, Kerina Maulidya, “Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Hadapan Semua Pihak Secara Bersama-sama”, *Notary Law Journal*, Vol.1, No. 2, (April 2022): 157-175.

Putri, Kerina Maulidya, Ichsan Anwary, dan Diana Haiti “Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-sama”, *Notary Law Journal*, Vol. 1, No.2 (April 2022): 162-164.

Saputra, Denny dan Sri Endah Wahyu Ningsih, “Prinsip Kehati-hatian Bagi Notaris/PPAT dalam Menjalankan Tupoksinya dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik”, *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 3 (September 2017): 351.

Wilson, Anna, Gerlese Akerlind, Barbara Walsh, Bruce Stevens, Bethany Turner, dan Alison Shield, “Making ‘Professionalism’ Meaningful to Students in Higher Education”, *Studies in Higher Education*, Vol. 38, No. 8 (Oktober 2013): 1222-1238.

#### **Skripsi, Tesis, Desertasi**

Pustika, Shinta Nora, “Perlindungan Upah Bagi Calon Notaris Yang Magang di Kantor Notaris Wilayah Kota Yogyakarta”, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2017.

Zulkarnaen, Sam Dwi, “Prinsip Kehati-hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Melaksanakan Jabatannya”, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2767)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1895).

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19/PERKUM/INI/2019 Tentang Magang.

Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 22/PERKUM/INI/2021 tentang Pendaftaran Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.